## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Di Indonesia pemimpin perempuan dalam pemerintahan masih sedikit dan belum memenuhi afirmasi 30% keterwakilan perempuan di legislatif (Ari-Tonang, 2014; Red, 2014), walaupun banyak telah telah banyak perempuan yang menjadi menetri dan kepala daerah tetapi masih belum dikatakan memenuhi afirmasi 30 %. Saat ini, kuota perempuan di legislatif baru terisi 17,1%, menteri peremppuan pada kabinet kerja baru 24%, dan pemimpin daerah perempuan baru 7,5%. Hal itu berdasarkan data pada tahun 2018. Keberadaan perempuan dilegislatif masih bersifat semu dan masih berupa himbauan kepada partai politik yang merupakan pintu gerbang untuk dapat berperan dalam pemerintahan (Astuti, 2013). Tidak hanya pada pemerintahan, area publik lainnya masih didominasi kepemimpinan laki-laki (Khotimah, 2015). Sedangkan perempuan lebih mendominasi area kerja informal (Arifin, 2004) dan mendominasi kepemimpinan pada area yang terfemininkan seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Kemdikbud, 2017; Hall, 1996; Henderson-Kelly dan Pamphilon, 2000).

Fenomena rendahnya angka pemimpin perempuan pada area publik di Indonesia bukan hal baru. Hal ini berhubungan dengan konstruksi gender yang telah mengakar yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin dan pengambil keputusan (Stuers, 2017). Sosialisasi laki-laki sebagai pemimpin terjadi sejak usia dini dan usia sekolah seperti hasil wawancara yang dilakukan di satu sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) yang menunjukkan adanya perlakuan berbeda kepada anak laki-laki dan anak perempuan ketika guru mengajarkan kepemimpinan secara tidak langsung. Berdasarkan wawancara terhadap seorang guru TK laki-laki yang dilakukan pada bulan Oktober tahun 2017, ada kesepakatan bahwa anak laki-laki dan perempuan harus diperlakukan sama. Namun, pada prakteknya guru tersebut menyebutkan bahwa anak laki-laki lebih diutamakan untuk mendapatkan pembelajaran kepemimpinan karena dianggap sebagai calon pemimpin.

Perlakuan yang berbeda dalam pembelajaran kepemimpinan mengindikasikan adanya diskriminasi dan keterbatasan akses anak perempuan dalam kepemimpinan. Diskriminasi dan keterbatasan akses muncul karena adanya pandangan yang berbeda terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. Perbedaan pandangan tersebut dilatarbelakangi oleh pandangan budaya, agama, sosial (Adkison, 1981; Grogan, 1999; Northouse, 2009; Rusch, 2004; Novianti, 2008; Lubis, 2017; Abu-Tineh, 2012). Dalam pandangan sosial dan budaya, perempuan ditempatkan pada sektor domestik dan dipandang kurang maskulin pemimpin (Adkison, 1981: Grogan. meniadi seorang 1999; Northouse, 2009; Rusch, 2004; Novianti, 2008; Lubis, 2017). Hal ini diperkuat dengan doktrin agama yang ditafsirkan sesuai kepentingan tertentu (Novianti, 2008). Padahal perempuan memiliki potensi yang sama untuk menjadi seorang pemimpin (Scriviens, 2002), contoh pemimpin perempuan yang berhasil di Indonesia yaitu Sri Mulyani dengan segala prestasi yang telah diraihnya (Chandra, 2018)

Rendahnya akses perempuan terhadap kepemimpinan juga dipengaruhi oleh definisi kepemimpinan maskulin yang lebih berorientasi pada kontrol, kekuasaan, dominasi dan persaingan sehingga perempuan dengan stereotipe lembut dan submisif-nya sulit untuk dapat mengakses posisi kepemimpinan (Scivens, 2002; Henderson-Kelly & Pamfilon, 2000; Rodd, 2012; Abu-Tineh, 2012). Disisi lain, beberapa hasil penelitian mengenai kepemimpinan perempuan mengungkapkan bahwa perempuan memiliki kemampuan yang baik dalam memimpin walaupun masih ada hambatan untuk dapat memimpin pada ranah maskulin seperti politik atau eksekutif karena adanya anggapan bahwa perempuan kurang berani mengambil resiko, terlalu fleksibel dan penuh toleransi (Hennig dan Jardim , 1977; Kinney, 1992; Cox, 1996; Hall, 1996; Glover & Law, 2000; Mardiyati, 2014).

Penelitian mengenai kepemimpinan telah banyak dilakukan tetapi penelitian mengenai kepemimpinan di sektor PAUD relatif masih sedikit terutama yang mengkhususkan telaah kepemimpinan dan gender di PAUD (Stipek and Ogana, 2000; Bush, 2013; Rodd, 2012; Muijs *et al*, 2004; Woodrow & Busch, 2009; Chan, 2017). Penelitian yang sudah dilakukan terkait kepemimpinan dan gender di lembaga PAUD

contohnya adalah Scrivens (2002) dan Henderdon-Kelly & Pamfilon (2000). Scriviens (2002) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa hasil penelitian dari beberapa negara seperti New Zealand, Australia, dan Amerika Serikat memberikan kesempatan bagi pemimpin perempuan pada ranah PAUD untuk mendekonstruksi konsep dominan kepemimpinan karena perempuan dianggap memiliki kemampuan dalam memimpin dan gaya kepemimpinannya tepat diterapkan di PAUD. Selaras dengan Henderson-Kelly & Pamfilon (2000) dengan penelitian di Australia mengungkapkan bahwa perempuan harus diberikan kesempatan untuk mengembangkan pandangan, model dan pemaknaan sendiri mengenai kepemimpinan berdasarkan model feminis.

Pada ranah pendidikan terutama PAUD, kepemimpinan perempuan lebih mendominasi (Kemdikbud, 2017; Hall, 1996; Henderson-Kelly dan Pamphilon, 2000) karena stereotipe tradisional yang menganggap pendidikan anak sebagai salah satu tugas utama perempuan (Dewantara dalam Musyafa, 2017; Sumsion, 2000) dan PAUD merupakan ranah pekerjaan yang telah terfemininkan (Warin, 2014). Tetapi ketika laki-laki berperan dalam PAUD maka laki-laki cenderung memiliki kemudahan akses untuk menduduki posisi sebagai pemimpin (Sumsion, 2000).

Ketika perempuan dan laki-laki diharapkan memiliki kesempatan dalam kepemimpinan, sebaiknya pembelajaran yang kepemimpinan dapat diakses oleh anak laki-laki dan anak perempuan serta dipelajari sejak dini. Anak perempuan memiliki potensi, tugas, dan tanggung jawab yang sama dengan anak laki-laki untuk menjadi pemimpin (Mardiyati, 2014) karena salah satu karakteristik umum seorang pemimpin tidak spesifik berdasarkan jenis kelamin (Arnott, 2013). Ketika perempuan terlibat dalam kepemimpinan, maka suara perempuan bisa terdengar dan kebijakan-kebijakan yang sensitive gender akan lebih mudah dilahirkan (Dhewy, 2017). Sehingga keadilan gender di masyarakat lebih cepat tercapai. Seorang pemimpin tidak dilahirkan tetapi dibentuk, maka kepemimpinan menjadi diajarkan dan dipelajari (Brungardt, 1997).

Pembelajaran kepemimpinan dapat diberikan kepada anak sejak dini karena karakteristik kepemimpinan telah ada pada diri anak seperti

kemampuan sosial dan kognitif, kemampuan verbal tinggi, sifat prososial, dan usia (Shin *et al*, 2004). Anak sudah dapat memahami isuisu yang relevan dengan kehidupan mereka dan anak adalah agen aktif yang dapat membangun makna dan identitasnya sendiri (McNaughton, *et al*, 2007; Dahlberg, *et al*, 1999). Isu-isu tersebut salah satunya adalah isu kepemimpinan. Selain itu, anak juga merupakan sosok yang kompeten dalam kehidupannya, mampu membuat keputusan sendiri, dan menentukan kehidupan serta pengalaman mereka dalam pengaturan sosial (O'Kane, 2008; Moss, 2011; Luff & Webster, 2014; Millei & Kallio, 2016). Kemampuan-kemampuan anak tersebut, memungkinkan untuk mempraktekkan kepemimpinan dan pembelajaran kepemimpinan biasanya diberikan dalam bentuk yang lebih formal, terstruktur, dan ada campur tangan dari lembaga (Brungart, 1991) dan sekolah merupakan tempat yang tepat untuk mengembangkan kepemimpinan anak.

Penelitian yang berkaitan dengan kepemimpinan dan gender anak usia dini telah banyak dilakukan seperti Mawson (2009) dan Lee et al (2005). Penelitian Mawson (2009) dan Lee et al (2005) lebih kepada gaya kepemimpinan anak anak laki-laki dan anak perempuan. Dalam penelitian Mawson (2009) menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan perempuan dapat disebut sebagai sutradara yaitu mengatur dan ikut serta dalam aktivitas sedangkan istilah diktator seperti memerintah lebih tepat disematkan kepada gaya kepemimpinan anak laki-laki. Sedangkan temuan penelitian Lee, et al (2005) mengungkapkan bahwa karakteristik kepemimpinan anak itu unik, baik anak laki-laki maupun anak perempuan cukup powerful dalam cara dan gaya kepemimpinannya masing-masing, serta pemberlakuan seseorang dianggap pemimpin dipengaruhi oleh perbedaan usia dan dinamika ruang kelas.

Penelitian Mawson (2009) dan Lee et al (2005) baru berbicara mengenai gaya kepemimpinan anak laki-laki dan anak perempuan, belum terkait dengan proses pembelajaran kepemimpinan anak di PAUD. Walaupun ada penelitian yang berkaitan dengan pembelajaran kepemimpinan seperti yang dilakukan oleh Comer (2001) dan Hensell (1991). Tetapi hal tersebut belum dikaitkan gender. Comer (2001) dalam penelitiannya di Amerika mengungkapkan bahwa pembelajaran di PAUD dapat dilakukan dengan cara merefleksikan tontonan animasi *the* 

Lion King yang dapat membantu anak memahami dan mengimplementasikan konsep kepemimpinan. Sedangkan Hensell (1991) dalam penelitiannya yang dilakukan di California Amerika, mengungkapkan bahwa dalam pembelajaran kepemimpinan harus diimbangi dengan dikembangkannya kemampuan prososial anak seperti peduli terhadap orang dewasa, teman sebaya dan hewan peliharaan di kelas. Sayangnya penelitian-penelitian tersebut belum dikaitkan dengan gender.

Di Indonesia penelitian mengenai kepemimpinan di PAUD berbicara mengenai kepemimpinan kepala sekolah di PAUD seperti yang telah dilakukan oleh Listiyawati, dkk (2016), Buana, dkk (2018). Listiyawati, dkk (2016) dalam penelitiannya mengunggapkan bahwa gaya kepemimpinan kepala sekolah di PAUD berbeda-beda terdiri dari gaya kepemimpinan demokratis dan kepemimpinan otokratis dan keduanya mempengaruhi kinerja guru. Hal sama juga diungkapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Buana, dkk (2018) bahwa gaya kepemimpinan demokratis lebih banyak diterapkan oleh kepala sekolah PAUD di kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru. Kedua penelitian yang dilakukan di Indonesia lebih berbicara tentang gaya kepemimpinan kepala sekolah, penelitianya belum menyentuh proses pembelajaran kepemimpinan anak dengan analisis gender. Sehingga, penelitian ini bermaksud mengisi celah dalam literatur mengenai topik kepemimpinan yang difokuskan pada pembelajaran kepemimpinan di PAUD ditinjau dari perspektif gender.

Penelitian ini berusaha memberikan kontribusi untuk memahami proses pembelajaran kepemimpinan dan gender di PAUD. Teori postdevelopmentalisme digunakan untuk membantu agar dalam melihat suatu permasalahan tidak hanya dari satu sudut pandang, tidak menguniversalkan satu teori untuk berbagai permasalahan di tempat yang sama maupun berbeda, dan memiliki pandangan bahwa anak merupakan sosok yang berpengalaman (Morrow, 2006).

#### 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah digunakan untuk menemukan kerangka berfikir yang tepat dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- 1. Bagaimana guru mengajarkan kepemimpinan kepada anak?
- 2. Bagaimana anak mendefinisikan kepemimpinan melalui interaksi dan percakapan dengan orang lain serta melalui kegiatan aktivitas yang dilakukannnya?
- 3. Bagaimana praktik kepemimpinan yang dilakukan anak dalam aktivitasnya di sekolah?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

- 1. Untuk mengetahui guru mengajarkan kepemimpinan kepada anak
- 2. Untuk mengetahui definisi kepemimpinan menurut anak melalui interaksi dan percakapan dengan orang lain serta melalui kegiatan aktivitas yang dilakukannnya.
- 3. Untuk mengetahui praktik kepemimpinan yang dilakukan anak dalam aktivitasnya di sekolah.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini dilakukan, hasilnya dapat memberi gambaran yang cukup komprehensif mengenai bagaimana pembelajaran kepemimpinan di PAUD ditinjau dari perspektif gender sehingga dapat berkontribusi baik untuk kebtuhan praktis maupun untuk pengembangan ilmu di bidang PAUD khususnya tentng pembelajaran kepemimpinan anak usia dini dan gender.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan baik bagi para guru maupun bagi para pemangku kebijakan. Bagi para guru, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian dan sumber informasi mengenai bagaimana melaksanakan pembelajaran kepemimpinan di PAUD yang tidak bias gender. Bagi pemangku kebijakan, hasil penelitian ini kiranya dapat dijadikan bahan kajian dan sumber informasi untuk merumuskan pembelajaran kepemimpinan yang mengutamakan kesetaraan akses antara anak laki-laki dan anak perempuan.

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada bidang keilmuan PAUD dengan memberi satu pijakan bagi lahirnya penelitian-penelitian lanjutan dalam topik pembelajaran kepemimpinan untuk anak usia dini yang mengutamakan kesetaraan akses bagi anak laki-laki dan anak perempuan dan dapat mengurai kompleksitas yang ada serta dharapkan guru dapat memberikan pembelajaran kepemimpinan dalam berbagai aktivitas yang bersifat umum.

# 1.5 Struktur Organisasi tesis

Tesis ini disajikan dalam lima bab yang terdiri dari bab pendahuluan, kajian teori, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta simpulan, implikasi, dan saran. Berikut adalah uraian ringkas mengenai kandungan setiap bab dan kaitan satu sama lainnya.

BAB I pendahuluan menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi tesis.

BAB II menjelaskan landasan teori maupun literatur yang berkaitan dengan pembelajaran kepemimpinan di PAUD. Dalam bagian ini juga dipaparkan bagaimana teori postdevelopmentlisme mendasari pembelajaran kepemimpinan serta bagaimana perspektif gender terhadap pembelajaran kepemimpinan di PAUD.

BAB III menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam bagian ini dijelaskan juga instrumen yan digunakan, tahapan pengumpulan data yang dilakukan, hingga langkahlangkah analisis data yang dijalankan.

BAB IV hasil dan pembahasan menyampaikan dua hal utama, yakni (1) temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dengan berbagai kemungkinan bentuknya sesuai dengan rumusan masalah penelitian, dan (2) pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.

BAB V simpulan dan rekomendasi menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian ini.